

**THE IMAGINED COMMUNITY OF INDONESIA: PERTENTANGAN
NASIONALISME INDONESIA VS ETNONASIONALISME BANGSA
ACEH DALAM GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM)**

Cut Maya Aprita Sari

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Syiah Kuala
cutmayaapritasari@unsyiah.ac.id

ABSTRACT

The greatest history of Aceh shows that Aceh was once a prosperous and sovereign autonomous State. On the other hand, before reaching its independence, Indonesia still consists of islands which is name Nusantara. Aceh's triumphs that had never been conquered by the Dutch caught Soekarno's interest in calling for Aceh's assistance in defending Indonesia's independence. Sukarno also invited Aceh to join and become a part of the Republic of Indonesia and build the Nationalism through The Imagined Community Of Indonesia. After joined Indonesia, Aceh experienced various social and economic discriminations that generated ethnic sentiment through the Free Aceh Movement (GAM). The purpose of this study is to conduct a theoretical analysis of the Indonesian nationalism penetration by GAM through the use of ethnic identity. This research uses qualitative method with literature study and refers to two main theories namely Nationalism initiated by Bennedict Anderson (1991) and ethnic theory which was initiated by Anthony Smith (1981). The results of this study indicate that GAM became a massive movement because it managed to build ethnic sentiment through the use of ethnic identity and against Indonesian nationalism. On this basis GAM gained great support from its followers and sympathizers to separate from Indonesia.

Keywords: *GAM, Ethnonationalism, Imagined Community*

A. PENDAHULUAN

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan suatu gerakan pembebasan yang bertujuan untuk memerdekakan rakyat Aceh dari Indonesia. Gerakan ini terbentuk pada 4 Desember 1976 di Gunung Halimon Pidie. Kemunculan awal gerakan ini didukung oleh sekelompok intelektual yang pada akhirnya mampu menjadi gerakan massif serta mendapat banyak simpati dari rakyat Aceh dan dunia internasional. Latar belakang kemunculan GAM disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak merata antara pusat dan daerah. Selain itu, pemerintahan

pusat didominasi oleh orang-orang Jawa sehingga memunculkan sentimen etnisitas di hati para pendukung GAM. GAM menjadikan Jawa sebagai *common enemy* bagi rakyat Aceh.

Berdirinya GAM merupakan suatu tanda tanya besar mengingat pada awal kemerdekaan Aceh bersepakat untuk membantu Indonesia dan menjadi bagian dari Negara Indonesia. Dengan kata lain, pada saat itu Aceh dan Indonesia merupakan satu kesatuan dengan hubungan yang baik. Pada 16 Juni 1948 Soekarno meminta rakyat Aceh untuk bergabung dengan Indonesia dan membantu dalam menghadapi kedatangan kembali penjajahan Belanda. Satu hari kemudian, dalam sebuah rapat akbar yang diselenggarakan di Lapangan Blang Padang Banda Aceh, Soekarno menjelaskan tentang maksud kedatangannya ke Aceh dan mengharapkan partisipasi rakyat Aceh untuk menyelamatkan Republik Indonesia.

Apabila Aceh bersedia untuk bergabung dan membantu Indonesia, Soekarno bersumpah atas nama Allah untuk memberikan hak kepada Aceh dalam menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Beliau juga berjanji akan menggunakan pengaruhnya sebagai kepala negara agar rakyat Aceh dapat melaksanakan syariat Islam. Meminjam istilah Benedict Anderson (1991), *The imagined community of Indonesia*¹ yang dibangun oleh Soekarno berhasil menarik simpati masyarakat Aceh sehingga Persatuan Ulama Aceh (PUSA) yang diketuai oleh Breueh menandatangani Maklumat Seluruh Ulama Aceh yang isinya mendukung penuh dan bersedia membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia². Maklumat tersebut selanjutnya juga menegaskan bahwa perjuangan ini ialah perjuangan suci sebagai perjuangan lanjutan Bangsa Aceh sebagaimana perjuangan dipimpin oleh Tgk. Chik Ditiro dahulu.

¹ Anderson, B. (1991). *Imgined Communities, Reflections On The Origin And Spread Of Nationalism*. London: Verso. Hal: 5-7

² Ibrahimy, M. N. (2001). *Peranan Tgk. M. Daud Breueh dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Dakwah. Hal. 64-65

Atas dasar nasionalisme sebagai bagian dari Indonesia, Aceh kemudian membantu melawan penjajahan Belanda secara moril maupun materi. Melalui Gabungan Saudagar Aceh (GASIDA) masyarakat Aceh mengumpulkan harta dan menyumbangkan dua buah pesawat terbang berjenis Dakota atau dikenal dengan nama Seulawah I untuk memperkuat pertahanan Negara. Tidak hanya itu, Aceh turut terlibat dalam PPKI dan pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Indonesia untuk sementara. Aceh pula aktif menyuarakan berita-berita perjuangan kemerdekaan melalui radio Rimba Raya di Aceh Tengah yang disiarkan dalam bahasa Indonesia, Aceh, Inggris, Belanda, Arab, Urdu, Mandarin, dan Jerman. Radio ini didirikan satu hari setelah kedatangan Belanda ke Yogyakarta pada 20 desember 1948. Radio Rimba Raya menggantikan Radio Republik Indonesia (RRI) yang berada di Yogyakarta yang pada masa itu di bom oleh Belanda. Bahkan ketika Soekarno berkunjung ke Aceh pada tahun 1948, Aceh memberikan 10 tas berisi tekstil, setengah kilogram emas dan sejumlah jam tangan berlapis emas. Soekarno pula sempat memakai jas yang dijahitkan oleh Bantasyam, seorang penjahit di Bireuen. Dukungan ini memberikan kontribusi besar bagi Indonesia untuk bertahan dari penjajahan Belanda hingga mencapai keberhasilan diplomasi dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda tahun 1949. Dalam konferensi inilah pengakuan terhadap Indonesia diberikan oleh Belanda³.

Namun demikian, setelah Indonesia merdeka, dukungan Aceh berubah menjadi beberapa pemberontakan besar dan massif serta mengancam kedaulatan Indonesia yaitu pemberontakan DI/TII dan GAM. Ini terjadi karena distribusi kekayaan yang tidak merata dan pemerintahan sentralistik. Pemberontakan ini berlanjut dengan tindakan represif sehingga mencatat Aceh sebagai daerah dengan intensitas kekerasan dan pelanggaran HAM tertinggi pada masa DOM diberlakukan.

³ Kawilarang, H. (2008). *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing. Hal: 152-153

Konflik yang terjadi berlandaskan kepada penentangan terhadap nasionalisme Indonesia. Hasan Tiro sebagai pendiri GAM kemudian membangun nasionalisme tingkat lokal yang dikenal dengan etnonasionalisme bangsa Aceh dan mempertentangkannya dengan nasionalisme Indonesia. Dalam hal ini, sentiment etnis dibangun menggunakan etnik identity melalui sejarah kejayaan Aceh masa lampau.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang *the imagined community of Indonesia* dan penentangan terhadap nasionalisme Indonesia sebagai pemicu munculnya GAM. Analisis teoritis dilakukan dengan menggunakan dua teori utama yaitu Nasionalisme yang digagas oleh Benedict Anderson (1991) dan teori etnis yang digagas oleh Anthony Smith (1981)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kaidah analisis sejarah melalui kajian kepustakaan. Oleh karena itu data diperoleh melalui pembacaan dan penelaahan buku-buku teks, dokumen-dokumen, koran, serta bahan tulisan lainnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikategorikan melalui pengelompokan waktu berdasarkan sejarah secara sistematis. Setelah dikelompokkan, data disusun sesuai dengan sub tema pembahasan dan dianalisis menggunakan teori yang telah ditentukan guna mencapai tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentangan terhadap nasionalisme Indonesia merupakan reaksi GAM terhadap diskriminasi dan distribusi kekayaan yang tidak merata antara pusat dan daerah. Penentangan ini berkaitan erat dengan sejarah kejayaan kerajaan Aceh masa lampau yang dijadikan oleh Hasan Tiro sebagai media pembangkit sentiment etnis. Pembahasan garis sejarah Aceh masa lampau sampai bergabung menjadi

bagian dari Indonesia merupakan kunci utama untuk memahami bagaimana proses penentangan terhadap nasionalisme Indonesia berlangsung.

Aceh masa lampau merupakan sebuah kerajaan yang otonom dan mandiri serta menunjukkan kejayaan dalam pemerintahannya. Kesultanan Aceh dikenal di mata dunia karena kemampuannya dalam menjalin hubungan baik dengan berbagai negara di Eropa dan Asia. Sejarah kegemilangan bangsa Aceh juga ditunjukkan saat berperang melawan Belanda dan Jepang. Jauh sebelum Indonesia terbentuk, Aceh telah memiliki struktur kenegaraan yang lengkap dengan kepemimpinan sultan secara turun temurun. Selain itu, Aceh juga memiliki bendera, lambang negara, dan mata uang sebagai yang digunakan dalam perdagangan regional, nasional, dan internasional⁴.

Aceh adalah negara pertama di Asia Tenggara pada abad pertengahan yang sudah dikenali di Eropa. Pada abad ke 14 Aceh sudah menjalankan sistem pemerintahan modern khususnya pada masa kerajaan Samudera Pasai. Peradaban Islam di Aceh berkembang pesat dan Kota Lhokseumawe menjadi kota perniagaan jalur timur selama 150 tahun. Lhokseumawe juga menjadi pusat pengetahuan dan perdagangan yang terkenal di Nusantara. Kerajaan Aceh memiliki pengaruh yang kuat hingga ke Semenanjung Melayu. Pada tahun 1513, Aceh menjadi pusat perdagangan Muslim dari Timur Tengah. Selanjutnya pada tahun 1520, kesultanan Aceh menguasai seluruh pantai di Sumatera di sepanjang Selat Melaka. Dalam sebuah buku berbahasa Perancis, *Larouse Grand Dictionaire Universelle*, menggambarkan bahwa Aceh cukup dominan di gugusan kepulauan Nusantara terutama pada akhir abad ke 16 hingga awal abad ke 17. Buku ensiklopedia Perancis *La Grand Encyclopedie* juga menuliskan:

Pada tahun 1582, kesultanan Aceh telah melebarkan sayap kekuasaan di beberapa wilayah di kepulauan Sunda Besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain) serta beberapa daerah di Semenanjung Melayu. Selain itu, Aceh juga menjalin hubungan niaga dengan berbagai negara di sekitaran Asia Timur hingga ke lautan Hindia tepatnya dari Jepang hingga Arab Saudi. Sebagai negeri yang berkuasa di Asia Tenggara, kerajaan Aceh telah menyerang Portugis yang menjajah Malaka pada

⁴ Gani, Y. H. (2008). *Status Aceh Dalam NKRI*. Institute For Ethnic Civilization Research. Hal: 41-48

awal abad ke 16. Pada tahun 1586, Aceh dengan 500 buah kapal perang dan kekuatan 60.000 pasukan maritimnya menyerang Portugis di Melaka⁵.

Kejayaan Aceh mulai terganggu saat kedatangan Belanda sejak tahun 1873-1942. Pada 26 Maret 1873 Belanda yang telah menguasai pulau Jawa kemudian secara resmi mengumumkan niatnya untuk berperang menguasai kerajaan Aceh. Dalam kurun waktu 1973-1942 perang berpuh tahun terjadi. Keinginan menaklukkan Aceh ternyata tidak berhasil dilakukan oleh Belanda. Hal ini dikarenakan kegigihan rakyat Aceh dalam peperangan melawan Belanda. Setiap ada pemimpin Aceh yang terbunuh atau tertangkap, dengan cepat peperangan dipimpin oleh pemimpin yang baru. Sultan terakhir yang memimpin perang melawan Belanda ialah Sultan Mahmudsyah. Setelah Sultan-Sultan Aceh mati syahid dalam peperangan, kepemimpinan dilanjutkan oleh Keluarga Ditiro yang terus berjuang melawan penjajahan.

Keturunan keluarga Ditiro lah yang banyak mewarisi tahta kepemimpinan saat Sultan-Sultan Aceh sebagai pimpinan yang sebelumnya mati syahid. Hampir semua keluarga Ditiro terlibat dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan Jepang. Yang pertama ialah Tgk. Chik Ditiro. Beliau syahid pada 25 Januari 1891 setelah berhasil memimpin negara selama 17 tahun. Kepimpinan digantikan oleh keluarga Ditiro lainnya dan yang terakhir ialah Tgk. Ma,at Ditiro sebagai pemimpin termuda berusia 16 tahun yang akhirnya tewas pada 3 desember 1911. Dalam garis keturunan keluarga Ditiro, sebahagian keluarga mereka mati syahid dan menjadi pahlawan-pahlawan besar Aceh dalam berperang melawan Belanda.

Mengutip tulisan Zentgraaf dalam buku *The price of freedom* yang ditulis Hasan Tiro, beliau menyebutkan bahwa "telah terlampau banyak darah keluarga DiTiro yang ditumpahkan". Berangkat dari kenyataan ini, Hasan Tiro merasa bahwa sebagai keturunan Keluarga DiTiro, beliau pun harus melanjutkan

⁵ Pernyataan tentang kedaulatan negara aceh tertulis dalam *Larouse Grand Dictionaire Universelle* (1886: 70) dan *Encyclopedie* (1874: 402) yang dikutip oleh Hasan Tiro dalam bukunya yang berjudul *Dokumen Negara Aceh-Sumatera Vol.II.* (1992) parliamentary Human Rights Group. Hal: 1-21

perjuangan yang telah dilakukan nenek moyangnya. Dalam buku tersebut Hasan Tiro menuliskan "Saya akhirnya memutuskan untuk melakukan takdir hidup saya itu memimpin rakyat dan negeri saya untuk merdeka"⁶. Keinginan Hasan Tiro ini nyatanya memang diterima oleh masyarakat Aceh sehingga menjadi satu legitimasi bagi kepemimpinannya dalam GAM.

Setelah Jepang menyerah kalah kepada sekutu dan pasukan tentera Jepang kembali pulang ke negara asalnya, keadaan ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menumbuhkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Ratusan tahun Aceh melawan dan menentang penjajahan dengan teriakan "*Allahu Akbar!*". Tetapi tiba-tiba kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta tanpa memakai *Basmalah* maupun *takbir*, maka pada saat itu, ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan, semua rakyat Aceh masih menolak untuk menyambutnya⁷. Pada masa itu, Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga kekosongan kuasa penjajahan kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk kembali berusaha menjajah Indonesia.

The Imagined Community of Indonesia

Keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia membuat Soekarno sebagai presiden Indonesia mencari jalan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Soekarno berusaha meminta bantuan Aceh dengan mempengaruhi tokoh-tokoh Aceh. Beliau mendekati tokoh-tokoh PUSA dan Uleebalang dengan mempergunakan isu Syariat Islam karena beliau mengetahui bahwa nilai keislaman di Aceh sangatlah kuat. Berbagai upaya dilakukan untuk menarik simpati rakyat Aceh agar mau membantu Indonesia.

Soekarno melakukan kunjungannya pertama kali pada 16 Juni 1948. Satu hari kemudian, dalam sebuah rapat akbar yang diselenggarakan di Lapangan Blang

⁶ Tiro, T. (1981). *The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan Di Tiro*. Ministry of Education and Information, State of Aceh-Sumatra. Hal: 2

⁷ Chaidar, A. (1999). *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Jakarta: Madani Press. Hal: 107

Padang, Banda Aceh, Soekarno menjelaskan tentang maksud kedatangannya ke Aceh. Isi pidato tersebut antara lain:

“Kedatangan saya ke Aceh ini spesial untuk bertemu dengan rakyat Aceh, dan saya mengharapkan partisipasi yang sangat besar dari rakyat Aceh untuk menyelamatkan Republik Indonesia ini... Daerah Aceh adalah menjadi daerah modal bagi Republik Indonesia, dan melalui perjuangan rakyat Aceh, seluruh wilayah Republik Indonesia dapat direbut kembali”⁸.

Aceh akan membantu Indonesia apabila syarat yang diajukan bangsa Aceh dipenuhi oleh Soekarno. Pada masa itu Soekarno juga mengajak Aceh bergabung menjadi bahagian Republik Indonesia serta menjanjikan akan membentuk negara baru yang berasaskan Islam. Sambil menangis terisak-isak, beliau bersumpah akan memenuhi janjinya tersebut apabila Aceh bersedia membantu Indonesia. Soekarno menyatakan bahwa Indonesia yang akan dibangun adalah negara yang berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan dalam pidato selanjutnya, beliau menyatakan bahwa Ketuhanan yang Maha Esa ialah “*Qul Huwallahu Ahad*”.

Soekarno bersumpah atas nama Allah untuk memberikan hak kepada Aceh dalam menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam. Beliau juga berjanji akan menggunakan pengaruhnya sebagai kepala negara agar rakyat Aceh dapat melaksanakan Syariat Islam. Janji-janji Soekarno ini memunculkan *The Imagined Community of Indonesia* bagi masyarakat Aceh. Dalam teori nasionalisme yang dikemukakan oleh Benedict Anderson⁹. *Imagined community* bermakna suatu komunitas yang dibayangkan. Tentunya ia bersifat abstrak, namun dapat dibayangkan sehingga memunculkan rasa kepemilikan yang tinggi. Janji-janji Soekarno membentuk pola pikir dan membuat masyarakat Aceh membayangkan bahwa Indonesia adalah Negara terbaik yang dapat mengakomodir kepentingan rakyat Aceh. Maka atas hal ini, PUSA yang diketuai oleh Daud Breueh

⁸ Zamzami, A. (1990). *Jihad Akbar di Medan Are.*, Jakarta: Bulan Bintang. Hal: 323

⁹ Anderson, B. (1991). Hal: 5-8

menandatangani Maklumat Seluruh Ulama Aceh¹⁰ yang isinya mendukung penuh Indonesia dan bersedia membantu mempertahankan kemerdekaan. Maklumat tersebut selanjutnya juga menegaskan bahwa perjuangan ini ialah perjuangan suci sebagai perjuangan lanjutan Bangsa Aceh sebagaimana perjuangan dipimpin oleh Tgk. Chik Ditiro dahulu.

Soekarno berusaha membangkitkan nasionalisme seluruh nusantara termasuk Aceh. Soekarno menyatakan, bahwa bangsa-bangsa yang dijajah oleh Belanda hendaknya bersatu, membangun suatu negara baru yaitu Indonesia merdeka dan harus berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia.

Imagined Community of Indonesia mendapatkan dukungan dari rakyat Aceh baik secara moril maupun materil. Untuk menghadapi penjajahan Belanda, tentara-tentara Aceh dikirim ke Jawa untuk berperang. *The imagined community* dalam kerangka nasionalisme yang dibangun oleh Soekarno berhasil menarik simpati rakyat Aceh untuk meninggalkan Aceh dan pergi berperang dengan Belanda. Padahal pada masa itu pemerintahan Aceh tengah goyah akibat perang dengan Belanda.

Bentuk dukungan lain diberikan Aceh melalui keterlibatannya dalam panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk mempersiapkan pemerintahan lokal di bawah Indonesia. Pada suatu acara jamuan makan malam dengan Daud breueh, Soekarno menyarankan kepada rakyat Aceh dan Gabungan Saudagar Aceh (GASIDA) untuk mengumpulkan dana untuk membeli pesawat terbang¹¹. Dengan pengaruh Daud Breueh yang ketika itu menjadi pemimpin di Aceh Langkat dan Tanah Karo, beliau mengumpulkan para pedagang dan pemimpin Aceh lainnya untuk bermusyawarah membicarakan masalah ini. Dan pada waktu itu, dalam

¹⁰ Maklumat Ulama Seluruh Aceh, yang isinya antara lain ialah: "Segenap lapisan rakyat telah bersatu padu dengan patuh berdiri dibelakang maha pemimpin Ir. Soekarno untuk menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan, menurut keyakinan kami, bahawa perjuangan ini ialah perjuangan suci yang disebut PERANG SABIL. Maka percayalah wahai bangsaku, bahawa perjuangan ini sebagai sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh Teungku Chik DiTiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain".

¹¹ Eda, F., & Setya, D. (1999). *Sebuah Kesaksian Aceh Menggugat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal: 19

waktu yang sangat singkat, para pedagang dapat mengumpulkan dana yang sangat besar serta membeli pesawat terbang yang masing-masing berharga 120.000 USD¹².

Sumbangan yang besar dari bangsa Aceh menjadi dasar bagi Soekarno sehingga menyebut Aceh sebagai daerah modal Indonesia. Sumbangan ini berkontribusi dalam membawa Indonesia bertahan hingga mencapai keberhasilan diplomasi dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda tahun 1949. Dalam konferensi inilah Pengakuan terhadap Indonesia diberikan oleh Belanda.

Penentangan terhadap Nasionalisme Indonesia

Kekecewaan bangsa Aceh kemudian muncul ketika Soekarno akhirnya membentuk negara Indonesia yang nasionalis dan tidak berasaskan Islam seperti yang diharapkan dan dijanjikan kepada masyarakat Aceh. Hal ini terlihat dari isi pidato beliau di Amuntai, Kalimantan Selatan pada 27 Januari 1953 yang isinya menyatakan bahwa Soekarno menolak Islam sebagai dasar negara¹³. Pada akhirnya, *the imagined community of Indonesia* yang sebelumnya terbentuk dan menghasilkan dukungan yang luar biasa terhadap pemerintahan Indonesia, bertransformasi menjadi penentangan nasionalisme Indonesia.

Penentangan awal terhadap nasionalisme Indonesia direpresentasikan melalui pemberontakan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) yang didirikan secara resmi pada 21 September 1953 dan dipimpin oleh Daud Breueh. Breueh menyatakan bahwa impian rakyat Aceh adalah masa kejayaan Sultan Iskandar Muda, suatu kejayaan Negara Islam pada masanya¹⁴. Gerakan ini kemudian berhasil diredam di tahun 1960-an oleh Kolonel M.Jasin sebagai Pangdam IskandarMuda pada masa itu. Namun demikian, melihat perkembangan janji Indonesia terhadap Aceh dan pemerintahan sentralistik yang berlaku, maka

¹² Ibrahimy, M. N. (2001). *Peranan Tgk. M. Daud Breueh dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Dakwah. Hal: 44

¹³ Tempo, M. (2003, Agustus). Edisi Khusus. Hal: 49

¹⁴ Ibid., Hal: 32

Hasan Tiro sebagai murid dari Daud Breueh membentuk gerakan baru yaitu GAM yang didirikan pada 4 Desember 1976 di Gunong Halimon Pidie. Pada awal pembentukannya, GAM didukung oleh sekelompok intelektual Aceh yang menuntut kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Kelompok ini pula menganggap telah terjadi kolonisasi Jawa atas masyarakat dan kekayaan Aceh¹⁵.

Puncak gagasan Hasan Tiro terjadi saat pemeritahan Orde Baru melakukan eksplorasi minyak bumi dan gas alam secara besar-besaran di Aceh Utara sekitar tahun 1960an dan 1970an. Pertamina melihat Aceh merupakan potensi besar bagi Indonesia. Mobil Oil Indonesia menemukan adanya gas alam di Aceh Utara yang berjumlah sebesar 17.1 triliyun Standart Cubic Feet (SCF). Atas penemuan ini, Pertamina membentuk PT Arun NGL yang berhasil melakukan ekspor minyak pertama di tahun 1978. Dalam ekspor 1978 diikuti ekspor pada tahun 1980, PT Arun NGL memberikan keuntungan bagi Indonesia sebesar USD 1.166.851.269,33. Aceh tercatat menghasilkan gas alam cair (LNG) 120-130 kapal setahun, dengan nilai per kapal sebanyak 6-9 juta USD. LPG dihasilkan sebanyak 30-40 kapal dengan nilai jual 2.700.000 USD per kapal. Minyak mentah sejumlah 1,1 juta tong dihasilkan per hari dengan harga 12-14 USD per tong. Daya tarik berupa melimpahnya sumber daya alam ini mengundang investor asing datang ke Aceh. Sejak saat itu gas alam cair di kilang oleh PT Arun Natural Gas Liquefaction (NGL) yang berasal dari PT Exxon Mobil Oil Indonesia. Kota Lhokseumawe Aceh Utara telah dijadikan kawasan Industri Petro Kimia Modern¹⁶. Sumber APBN (Anggaran Pembelanjaan Negara) sangat didominasi oleh ekspor sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Akibatnya jumlah produksi NGL dilipatgandakan dengan menambah jumlah tong penyimpanan gas atau biasa dikenal dengan istilah *condensate* dari 2 buah menjadi 6 buah. Penambahan ini memberi dampak kepada jumlah eksport yang meningkat pada tahun 1992. PT. Arun mampu mengeksport

¹⁵ Nurhasim, M. (2008). *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka, Kajian Tentang Konsensus Normatif antar RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*, Jakarta: Pustaka Pelajar. Hal: 6

¹⁶ Koran Waspada. (1998, September 11).

216 kapal per tahun. Sementara itu, Pertamina yang mengeksplorasi minyak bumi di Aceh Timur berhasil meningkatkan kemampuannya, menjelang akhir tahun 1980-an, 30% ekspor minyak dan gas nasional berasal dari Aceh¹⁷.

Mobil oil selanjutnya mendirikan pabrik pupuk yaitu PT. AAF (Aceh Asean Fertilizer) dan PT. PIM (Pupuk Iskandar muda). PT AAF mulai beroperasi pada tahun 1981 dengan kapasitas produksi 335.000 ton pupuk urea setiap tahun. Sedangkan PT. PIM beroperasi pada 1983 dengan kapasitas produksi 570.000 ton pupuk urea dan 1000 ton amoniak per tahun. Pemerintah pula mendirikan pabrik kertas PT. KKA (Kertas Kraft Aceh) yang mulai beroperasi pada tahun 1989 dan menghasilkan 130.000 ton kertas semen dalam setahun dimana bahan dasarnya diambil dari hutan pinus di Aceh Tengah¹⁸.

Berbanding terbalik dengan hal tersebut, masyarakat Aceh justru hidup miskin. Pendirian wilayah industri ini sangat merugikan masyarakat dalam hal ganti rugi tanah. PT Arun hanya memberikan harga antara Rp.100-180/m sementara PT AAF memberikan harga Rp.300-350/m dan pada tahun 1980 PT PIM memberikan harga antara Rp.800-1.200/m bahkan masyarakat ditakut-takuti untuk menyerahkan tanah, sebahagian kemudian ditempatkan di lokasi penampungan yang jauh dari desa asal dan mata pencaharian mereka¹⁹. Pembangunan industri di kawasan Aceh utara secara tidak langsung mengusir masyarakat Aceh dari wilayahnya sendiri seiring dengan meningkatnya arus transmigrasi ke Aceh. Para pendatang ini umumnya bekerja sebagai kontraktor sehingga berdirinya pabrik tidak mendayagunakan masyarakat setempat sebagai pekerja, tetapi justru memanfaatkan arus transmigrasi.

Aceh Utara dikenal penghasil beras utama di Provinsi Aceh. Namun, kekayaan yang tersimpan ini tidak dinikmati seluruh penduduknya. Masih banyak

¹⁷ Kompas. (1993, January 9)

¹⁸ Sulaiman, M. (2000). *Aceh Merdeka: Ideologi, Pimpinan, dan Gerakan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

¹⁹ Kontras Aceh. (2006). *Aceh Damai Dengan Keadilan, Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Jakarta: Kontras.
Hal: 33

penduduk miskin terpencil di pelosok-pelosok wilayah kabupaten. Pada Januari 2000 tercatat 59.192 keluarga yang tergolong prasejahtera di kabupaten Aceh Utara. Jumlah ini adalah yang tertinggi di antara 10 kabupaten dan kota di provinsi NAD.

Melihat hal ini, Hasan Tiro sebagai penggagas GAM kemudian berusaha menarik garis sejarah dari kejayaan Aceh masa lampau menuju berbagai kekecewaan yang dialami rakyat Aceh sejak bergabung dengan Indonesia. GAM mengusung ideologi berupa etnonasionalisme Aceh yang dilatarbelakangi oleh sejarah kejayaan Aceh masa lampau. Untuk menyebarkan ideologi ini, Hasan Tiro melakukan rekonstruksi sejarah dan membangkitkan sentiment kolektif. Beliau mempertentangkan nasionalisme Indonesia dalam membangun pemikiran-pemikiran politiknya. Baginya, nasionalisme Indonesia hanyalah produk etnis Jawa yang digunakan sebagai taktik untuk menjajah Aceh. Selanjutnya dinyatakan pula dalam sebuah tulisan beliau berjudul *Nasionalisme Indonesia (1985)*²⁰ bahwa nasionalisme Indonesia hanyalah pembenaran bagi Indonesia untuk menguasai Aceh.

Nasionalisme Indonesia dianggap sebagai representasi kepentingan Jawa. Buktinya adalah semua simbol nasionalisme Indonesia menggunakan bahasa Jawa seperti "Bhineka Tunggal Ika". Sistem dan nama-nama simbolis dalam birokrasi negara kesemuanya di namai dalam bahasa Jawa seperti Desa, Lurah, Kecamatan, Camat, Kabupaten, Bupati, dan lain sebagainya. Tiro juga menegaskan bahwa bangsa Jawa memiliki kedudukan yang baik untuk memanipulasi Nasionalisme Indonesia demi kepentingan mereka sendiri²¹.

Hasan Tiro kemudian membangun ethnic sentiment melalui penggunaan ethnic identity dan mempertentangkan Nasionalisme Indonesia. Dengan dua hal ini, GAM kemudian berhasil menjadi gerakan yang dikenal luas sampai ke dunia

²⁰ Tengku Hasan M. DiTiro, 1987, *Indonesia Nationalism: a western Invention to Subvert Islam and Toprevent Decolonization of the Dutch East Indies*, London, England: National Liberation Front Aceh Sumatera. (Tulisan ini di sampaikan oleh beliau dihadapan Majelis Seminar Dunia Islam di London, pada 31 Juli, 1985. Tema dari seminar tersebut ialah : Pengaruh Nasionalisme atas Umat Islam. Tulisan ini juga dipublikasikan dalam majalah Suara Aceh Merdeka edisi VI dan edisi khusus)

²¹ Teungku Muhammad Hasan DiTiro. 1987. *Indonesia Nationalism: a western Invention to Subvert Islam and Toprevent Decolonization of the Dutch East Indie.*, London, England: National Liberation Front Aceh Sumatera.

internasional. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah simpatisan GAM di tahun 1990-an. Dukungan dunia internasional juga berdatangan dalam berbagai bentuk. Persenjataan GAM diperoleh dari jalur internasional seperti dari gerakan Pattani Thailand, Malaysia, Gerakan Islam Moro Filipina, Gerakan Sikh India, Gerakan Esaan Tamil, Kazahstan, Libya, Afghanistan, serta dari eks pejuang di Kamboja. GAM pula memiliki garis komando yang kuat di dunia internasional seperti di Malaysia, Pattani (Thailand), Moro (Filipina), Afghanistan, dan Kazakhstan.

Nasionalisme Indonesia vs Etnonasionalisme bangsa Aceh

Pemikiran Anderson tentang nasionalisme serta teori etnonasionalisme karya Smith merupakan konsep yang relevan untuk menjelaskan fenomena di atas. Teori nasionalisme Anderson dapat menjelaskan kemunculan GAM sebagai reaksi dari kekecewaan terhadap pemerintahan pusat serta bagaimana proses penentangan nasionalisme Indonesia berlangsung. Sedangkan teori etnonasionalisme ala Smith akan mengatarkan kita kepada analisis terbentuknya ideologi etnonasionalisme aceh sebagai dasar dari GAM.

Konsep nasionalisme pada dasarnya mengalami pertentangan sepanjang sejarah. Sehingga tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskan nasionalisme secara memadai. Nasionalisme bagi Anderson merupakan *Imagined Community* atau satu komunitas politik yang dibayangkan. Ia memiliki keterbatasan, tetapi berdaulat, serta memiliki legitimasi emosional. Hal ini menyebabkan, meskipun sesama anggota dari suatu bangsa tidak pernah berjumpa, dan tidak saling mengenal, mereka merasa memiliki tali ikatan persaudaraan dan persamaan. Ikatan persaudaraan horizontal menjadi suatu dasar bagi anggota sebuah bangsa untuk mengikatkan diri di dalam entitas satu bangsa (*nation*) sendiri dijelaskan Anderson sebagai suatu komunitas politik dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan dan memiliki legitimasi

emosional. Pendapat Anderson ini meliputi empat hal pokok yaitu bangsa sebagai hal yang terbayang, terbatas, berdaulat, dan sebagai sebuah komunitas²².

Pertama ialah bangsa sebagai sesuatu yang terbayang (*imagined*) dimana anggota dari suatu bangsa pada dasarnya tidak saling mengenal dengan anggota yang lain, tidak pernah berjumpa maupun berinteraksi. Tetapi, walaupun mereka tidak saling berjumpa, mengenal, dan berinteraksi, mereka akan merasa bahwa mereka berasal dari satu bangsa yang sama. Sehingga terdapat semacam tali persaudaraan yang mengikat anggota suatu bangsa tersebut. Konteks *imagined* terlihat dari nasionalisme Indonesia yang dibangun oleh Soekarno melalui janji-janjinya yang berhasil membawa rakyat Aceh kepada kesepakatan untuk bergabung dan membantu Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari Indonesia sebagai *imagined community* bagi masyarakat Aceh. Melalui pidato dan janji-janjinya, soekarno membayangkan kepada rakyat Aceh bahwa Indonesia adalah negara terbaik. Namun setelah terjadi akumulasi kekecewaan, maka konteks *imagined* dipertanyakan oleh Hasan Tiro dengan membalik logika pikir sebagai berikut: Seharusnya, anggota suatu bangsa tidak menjatuhkan anggota yang lain. Walaupun anggota tersebut tidak pernah berjumpa, tidak pernah mengenal, dan berinteraksi, tapi dalam konteks nasionalisme semua anggota bangsa harus bersatu. Maka eksploitasi atas kekayaan alam Aceh, ketidakadilan, dan distribusi kekayaan yang tidak merata harusnya tidak terjadi dalam konteks *imagined* tersebut.

Kedua, Anderson kemudian menjelaskan bangsa sebagai sesuatu yang bersifat terbatas (*limited*), artinya setiap bangsa memiliki garis batas dengan bangsa-bangsa yang lain dan ada pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Sama seperti *imagined*, batasan dapat dijelaskan dalam dua situasi. Aceh merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Sehingga batasan berupa garis batas, maupun pembeda lain menjadi hilang dan melebur dalam satu bangsa yaitu

²² Anderson, B. (1991). Hal: 6-7

Indonesia. Namun setelah terjadi akumulasi kekecewaan, maka bangsa Aceh kembali menarik garis pembeda antara bangsa Aceh dan Indonesia untuk kemudian mempertentangkannya.

Ketiga, bangsa dibayangkan sebagai suatu yang berdaulat (*sovereign*) dimana setiap bangsa mempunyai kedaulatannya masing-masing. Kerajaan Aceh memiliki kedaulatannya sendiri di bawah kepemimpinan sultan secara turun-temurun. Namun, ketika Aceh bergabung dengan Indonesia, maka terminologi kedaulatan kerajaan Aceh secara otomatis berganti menjadi kedaulatan Negara Indonesia. Ketika konflik anatar keduanya terjadi, maka bangsa Aceh melalui GAM berusaha untuk memperoleh kedaulatannya kembali dengan cara berpisah dari Indonesia dan mendirikan *successor state* dari kerajaan Aceh masa lampau.

Keempat, bangsa dijelaskan Anderson sebagai sebuah komunitas (*community*), yang memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi, serta mendalam. Rasa kesetiakawanan yang dalam ini sering dijadikan alasan bagi anggota suatu bangsa untuk nyawa orang lain dan rela melakukan apapun demi bangsanya tersebut apabila bangsanya dalam keadaan terancam oleh sesuatu hal. Atas rasa kesetiakawanan yang tinggi terhadap satu bangsa yaitu bangsa Indonesia, rakyat Aceh rela meninggalkan daerahnya untuk berperang melawan Belanda. Padahal pada saat itu, rakyat Aceh masih mengalami *Inferiority Complex*, yaitu suatu gejala kejiwaan, ketidakseimbangan, merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri yang diakibatkan oleh perang yang cukup lama dengan Belanda. Keadaan ini berusaha di atasi dengan mencari suatu pegangan hidup yang baru. Situasi ini dengan mudah dimanfaatkan oleh Soekarno dengan memberikan janji-janji, membangun nasionalisme, dan membentuk *imagined community of Indonesia* sebagai negara baru yang terbaik.

Secara teoritis, konsep *community* sebagai kesadaran akan satu bangsa mensyaratkan anggotanya untuk rela melakukan apapun demi bangsanya. Artinya Indonesia seharusnya menyelenggarakan pemerintahan yang jauh dari

diskriminasi dan tidak sentralistik. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Akumulasi kekecewaan pada akhirnya membawa Hasan Tiro mendirikan GAM dan membangun etnonasionalisme bangsa Aceh.

Secara teoritis, etnonasionalisme merupakan terminologi yang berada di bawah nasionalisme. Dengan kata lain, etnonasionalisme merupakan nasionalisme tingkat lokal yang biasanya muncul untuk menentang nasionalisme pusat. Apabila seseorang berada dalam suatu persaingan yang tidak berimbang dan adil, maka orang tersebut akan berusaha mempertahankan dirinya dengan mencari identitas budayanya atau sering disebut dengan *ethnic identity*. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *identity* bukan hanya merujuk pada suku, tetapi dapat juga berupa ras, rumpun, maupun agama. Smith (1981) menjelaskan bahwa ketika berada pada situasi yang konfliktual, maka seseorang cenderung menggunakan *ethnic identity*-nya untuk mempertentangkannya dengan yang lain sehingga terjadi *ethnic revival*. Hal ini dimaknai sebagai gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan dan identitas bagi populasi yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk bangsa yang berpotensi dan nyata²³.

Atas keadaan ini, nyatanya nasionalisme tidak dapat menjadi solusi sehingga konflik selalu muncul dari kelompok-kelompok yang merasa dikalahkan. Ini bermakna bahwa *ethnic revival* membicarakan tentang munculnya sentimen didalam kelompok-kelompok tertentu. Sentimen yang muncul merupakan punca terjadinya konflik. Yang dimaksud dengan sentimen dalam pendekatan ini merupakan perasaan yang ditujukan kepada kelompok tertentu, atau kepada nilai-nilai budaya tertentu.

Melalui pendapat Smith (1981) di atas maka dapat dianalisis bahwa, GAM merupakan suatu gerakan etnonasionalisme yang awalnya hanya berbentuk sentiment pribadi. Hasan Tiro kemudian mengubah sentiment pribadi yang dirasakannya menjadi sentiment kolektif dengan mencari identitasnya sebagai

²³ Smith, A. (1981). *The Ethnic Revival*. USA: Cambridge University Press.

bangsa Aceh. Maka proses menarik kembali sejarah kejayaan Aceh masa lampau dilakukan. Sejarah kejayaan inilah yang kemudian menjadi alat efektif untuk membangun sentiment etnis. Ini sebabnya, sejarah kejayaan Aceh masa lampau menjadi materi wajib dalam *camp-camp* latihan GAM. Materi ini dinamai dengan *Aceh education*. Selain melatih kekuatan militer, *Aceh education* juga mengajarkan tentang sejarah kejayaan Aceh masa lampau. Hasan Tiro selalu mengajarkan kepada pemuda Aceh agar mengerti sejarah Aceh dan menyadari bahwa Aceh memang unik dan berbeda dari bangsa lainnya. Materi *Aceh education* disampaikan Hasan Tiro secara tegas sebagai doktrin untuk para anggota GAM. Semua materi disampaikan dalam bahasa Aceh untuk lebih memperkuat etnonasionalisme keacehan mereka²⁴.

Pada Akhirnya, ethnic revival terjadi. GAM menjadi gerakan yang massif dan cukup dikenal bahkan sampai di dunia internasional di era 1980an. Kemunculan GAM ditanggapi pemerintahan orde baru secara represif hingga aceh dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) di tahun 1989. Pada masa ini, Aceh menjadi daerah dengan kasus pelanggaran HAM tertinggi dan intensitas kekerasan yang tinggi pula. Sekitar 23.366 orang perempuan menjadi janda karena suami mereka menjadi korban operasi militer Indonesia²⁵. Sekitar 1.000 orang masyarakat sipil di bunuh dalam tiga tahun pertama DOM. Pada akhir tahun 1998 tercatat 871 orang dibunuh oleh tentara Indonesia-Jawa dan 387 orang lainnya hilang sehingga pada akhirnya ditemukan wafat. Sekitar lebih dari 500 orang hilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi dalam skala yang berat semasa DOM diterapkan. Tetapi di sisi lain, DOM justru menguntungkan posisi GAM dengan meningkatnya sentimen rakyat Aceh kepada pemerintah Indonesia. Hal ini mengakibatkan jumlah dukungan terhadap GAM bertambah. Dalam Surat kabar *The Star* (25 Juli 1990) menulis bahwa sebanyak delapan dari sepuluh orang

²⁴ Sari, CMA. (2013). Thesis Master Sains Politik. *Analisis Pemikiran Politik Hasan Tiro Dalam Konteks Perjuangan Etnonasionalisme Dan Sejarah Konflik Antara Aceh Dengan Indonesia-Jawa*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Hal: 98-100

²⁵ Kontras Aceh (2006). Hal: 36

Aceh mendukung GAM berdasarkan hasil *votting* ²⁶. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota GAM hanya sekitar 500 orang. Kemudian bertambah banyak menjadi 5.000 pendukung yang dapat dimobilisasi pada 1978²⁷.

Penulis dapat dijelaskan bahwa eksistensi GAM tidak terlepas dari dua ideologi yang diusung yaitu penentangan terhadap nasionalisme Indonesia dan entonasionalisme bangsa Aceh. Penentangan terhadap nasionalisme Indonesia merupakan reaksi atas hancurnya harapan bangsa Aceh terhadap *the imagined community of Indonesia*. Kondisi ini yang mempertentangkan nasionalisme Indonesia dengan etnonasionalisme bangsa Aceh yang menjadi ideologi dasar GAM. Maka rakyat Aceh berusaha mencari jati dirinya kembali dengan menggunakan identitas keacehan sebagai *ethnic identity* mereka. Maka lahirlah *ethnic revival* berupa pemberontakan berkepanjangan yang menuntut *successor state* of Aceh merdeka.

D. KESIMPULAN

Melalui analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *the imagined community Of Indonesia* terbentuk dalam harapan rakyat Aceh dikarenakan janji-janji Soekarno saat meminta Aceh bergabung dengan Indonesia. Bayangan tentang Indonesia sebagai negara yang terbaik membawa PUSA menyepakati bergabung Aceh ke dalam Indonesia. Setelah bergabung dengan Indonesia, perkembangan janji-janji Soekarno tidak mengarah ke hal positif. Pemerintahan yang sentralistik pada masa orde baru diiringi dengan eksploitasi kekayaan alam Aceh dan distribusi hasil yang tidak merata menambah kekecewaan rakyat Aceh. Akumulasi kekecewaan ini kemudian membawa Hasan Tiro mendirikan GAM pada 4 desember 1976.

Keberhasilan GAM sebagai gerakan yang massif tidak terlepas dari upayanya dalam membangun *ethnic sentiment* melalui penggunaan *ethnic identity*

²⁶ Tiro (1992). Hal: 10

²⁷ Sari (2013). Hal: 94-95

dan mempertentangkannya dengan nasionalisme Indonesia. Dalam teori nasionalisme yang dikemukakan oleh Anderson (1991) *The Imagined Community Of Indonesia* faktanya tidak terwujud sehingga GAM menggugat nasionalisme Indonesia menggunakan etnonasionalisme bangsa Aceh. Dalam konteks Smith (1981) *Ethnic identity* Aceh sebagai bangsa yang jaya di masa lampau menjadi dasar terbentuknya *ethnic sentiment* sehingga menghasilkan *ethnic revival*. Atas dasar ini GAM mendapatkan dukungan yang besar dari para pengikut dan simpatisannya untuk menjadi sebuah negara mandiri yang berdaulat dan berpisah dari Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., Tabrani ZA, & Murziqin, R. (2016). Responses of the Criminal Justice System. In *International Statistics on Crime and Justice* (pp. 87-109). Helsinki: HEUNI Publication.
- Anderson, B. (1991). *Imgined Communities, Reflections On The Origin And Spread Of Nationalism*. London: Verso
- Bustamam-Ahmad, K. (2014). Islam dan Kekerasan: Pengalaman untuk Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 67-80.
- Chaidar, A. (1999). *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Jakarta: Madani Press
- Duhri, S. (2016). Art as A Cultural Instrument: The Role of Acehnese Art in Resolving Horizontal Conflict. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 89-102. doi:10.26811/peuradeun.v4i1.88
- Di Tiro, T. (1987). *Indonesia Nationalism: a western Invention to Subvert Islam and Toprevent Decolonization of the Dutch East Indie*. London, England: National Liberation Front Aceh Sumatera
- Eda , F., & Setya, D. (1999). *Sebuah Kesaksian Aceh Menggugat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Gani, Y. H. (2008). *Status Aceh Dalam NKRI*. Institute For Ethnic Civilization Research.
- Haynes, J. (2015). Religion in Global Politics: Explaining Deprivatization. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(2), 199-216.
- Ibrahimy, M. N. (2001). *Peranan Tgk. M. Daud Breueh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta: Media Dakwah

- Kawilarang, H. (2008). *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing
- Kontras Aceh. 2006 *Aceh Damai Dengan Keadilan, Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Jakarta: Kontras
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Nurhasim, M. (2008). *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka, Kajian Tentang Konsensus Normatif antar RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Razali, M. F. (2010). *Teungku Haji Muhammad Hasan Krueng Kalee, Ulama dan Guru Besar Umat*. Aceh BESar: Yayasan Darul Ikhsan
- Sari, CMA. (2013). Thesis Master Sains Politik. *Analisis Pemikiran Politik Hasan Tiro Dalam Konteks Perjuangan Etnonasionalisme Dan Sejarah Konflik Antara Aceh Dengan Indonesia-Jawa*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia
- Smith, A. (1981). *The Ethnic Revival*. USA: Cambridge University Press
- Sulaiman, M. (2000). *Aceh Merdeka: Ideologi, Pimpinan, dan Gerakan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011). Nalar Agama dan Negara dalam Perspektif Pendidikan Islam. (Suatu Telaah Sosio-Politik Pendidikan Indonesia). *Millah Jurnal Studi Agama*, 10(2), 395-410.
- Tabrani ZA. (2016). Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah singkat Tentang Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia). *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*, 2(1), 41-56.

- Tiro, T. (1981). *The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan Di Tiro*. Ministry of Education and Information, State of Aceh-Sumatra
- Tiro, T. (1992). *Dokumen Negara Aceh-Sumatera Vol.II*. parliamentary Human Rights Group
- Tiro, T. (1987). *Indonesia Nationalism: a western Invention to Subvert Islam and Toprevent Decolonization of the Dutch East Indie.*, London, England: National Liberation Front Aceh Sumatera.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Zamzami, A. (1990). *Jihad Akbar di Medan Area*. Jakarta: Bulan Bintang